



Media: Koran Tempo

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Mei 2016

Halaman: 22

PILKADA KOTA YOGYAKARTA

Komisi Pemilihan Siapkan Dana Kampanye Rp 3 Miliar

Anggaran kampanye untuk penyediaan alat peraga, bahan kampanye, iklan, dan debat para calon.

Ali Nur Yasin
ali@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya menekan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai landasan pencairan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta 2017, kemarin. Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Wawan Budianto menuturkan, dari alokasi anggaran pemilihan wali kota sebesar Rp 14,9 miliar, jatah untuk fasilitasi kampanye para calon diputuskan sebesar 18 persen atau hampir mencapai Rp 3 miliar.

"Alokasi fasilitasi kampanye itu sudah menjadi item tertinggi di antara item kebutuhan lain yang ditanggung dana itu," ujar

Wawan di sela penandatanganan dokumen NPHD. Fasilitasi dana kampanye ini diproyeksikan untuk kuota jika pilkada diikuti lima pasangan calon. Melalui empat hal, dari penyediaan alat peraga, bahan kampanye, iklan, hingga debat para calon. Alokasi anggaran dana kampanye sebesar 18 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap dana fasilitasi kampanye tidak dianggap kecil, lalu memicu pelanggaran dengan menyediakan fasilitas kampanye sendiri. Sebab, kami juga akan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat," kata Wawan.

Dengan pencairan dana tersebut, Komisi akan segera memulai tahapan pilkada pada 22 Mei 2016 dengan menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Dilanjutkan pada 20 Juni-21 Juli membentuk badan *ad hoc* Komisi berupa panitia pemilihan kecamatan sebanyak 70 orang dan petugas pemungutan suara sebanyak 135 orang.

Pada pemilihan wali kota mendatang, Komisi mengasumsikan jumlah titik tempat pemungutan suara (TPS) bertambah tujuh tempat dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden

2014. Jumlah TPS yang disiapkan sebanyak 810 buah. "Tambahan itu untuk cadangan di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan jika regulasinya mengizinkan," ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Untung Supriyanto menyatakan anggaran kampanye tak menjamin pilkada minim pelanggaran. "Kami prediksi tim sukses para calon dan pendukungnya tetap bergerak untuk menyediakan alat kampanye sendiri. Itu seperti sudah tradisi yang susah dilawan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Menurut Untung, besaran dana kampanye yang disediakan KPU terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan kampanye pasangan calon. "Kebutuhannya bisa mencapai Rp 10 miliar karena persaingannya akan sangat ketat," kata dia.

Besarnya anggaran kampanye, kata Untung, karena letak geografis Kota Yogyakarta terbatas dengan penduduk sedikit, sedangkan masa kampanye memiliki jangka waktu panjang. Kondisi ini, menurut dia, menyebabkan biaya kampanye yang harus disiapkan calon sangat besar.

● PRIBADI WICAKSONO

Tindak Lanjut

Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005